**Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Manado**

***Performance Analysis Of Shopping Budget At The Regional Research And Development Planning Agency Of Manado City***

**Gordon Angel May1, Jessy D. L.Warongan2, Natalia Y. T. Gerungai3**

1,2,3 Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi,

Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

Email : gordonmay55@gmail.com1 jdimarcus@gmail.com2tellygerungai@gmail.com3

**Abstrak:** Penilaian kinerja anggaran dapat dilihat dari anggaran yang ada dan berapa realisasi yang akan disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan belanja pada instansi selama masa anggaran satu tahun tersebut. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis kinerja anggaran belanja daerah. Metode analisis yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, yaitu suatu metode yang sifatnya menguraikan dan menggambarkan suatu data atau keadaan serta melukiskan atau menjelaskan sedemikian rupa sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada. Hasil penelitian menunjukan bahwa analisis varians belanja menunjukkan adanya efisiensi penggunaan anggaran selama tahun anggaran, karena tidak melebihi target anggaran pada periode tersebut namun dilihat dari pengukuran rasio efesiensi belanja memperlihatkan bahwa penggunaan anggaran yang kurang efisien, pertumbuhan realisasi anggaran belanja berdasarkan analisis pertumbuhan belanja yaitu pertumbuhan negatif sedangkan perhitungan analisis keserasian belanja pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado lebih memprioritaskan anggaran pada belanja langsung daripada belanja tidak langsung

**Kata Kunci : Kinerja Anggaran, Varians, Efisiensi.**

***Abstract:*** *Budget performance appraisal can be seen from existing budget is and how much realization will be adjusted to the needs of spending on the agency during the one-year budged period. The purpose of this study is to analyze the Performance of the Regional Budget. The analytical method used to discuss the problems in this research is a descriptive analysis method, which is a method that describes and describes a data or situation and describes or explains in such a way that a conclusion can be drawn to answer existing problems. The results showed that the Expenditure Variance Analysis showed an efficient use of the budget during the fiscal year, because it did not exceed the budget target in that period but seen from the measurement of the Expenditure Efficiency Ratio showed that the use of the budget was less efficient, the growth of budget realization based on the Expenditure Growth Analysis was negative growth. while the calculation of the Expenditure Harmony Analysis at the Regional Research and Development Planning Agency of Manado City prioritizes the budget on direct expenditures rather than indirect expenditures*

***Keywords: Budget Performance, Variance, Efficiency***

**1. PENDAHULUAN**

Otonomi daerah yang berlaku di Indonesia didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 dijelaskan bahwa Pemerintah Pusat memberi kewenangan yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus anggaran daerah tersebut dengan meminimalkan campur tangan Pemerintah Pusat dan melibatkan dua pihak yaitu eksekutif dan legislatif. Pemerintah pusat memberikan otonomi kepada pemerintah daerah untuk dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan untuk dapat mendorong pengelolaan keuangan yang tertib dan taat kepada peraturan dalam rangka bentuk tanggungjawab pemerintah kepada masyarakat. Pemerintah daerah dalam upaya melaksanakan kegiatan atau program pelayanan kepada masyarakat tidak dapat menjalankannya tanpa adanya anggaran.

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kota Manado merupakan lembaga teknis daerah yang berfungsi sebagai unsur penunjang pemerintah kota Manado. Salah satu tugas yang dilakukan oleh Bapelitbangda dalam melakukan kegiatan pemerintah yang salah satunya terkait tentang pengurusan anggaran belanja. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kota Manado telah berupaya untuk menyesuaikan adanya perubahan-perubahan kondisi dan pengembangan dalam penyusunan anggaran belanja tetapi tidak dengan mengabaikan pengukuran kinerja anggaran baik secara mikro dan makro serta pengukuran kinerja anggaran standar biaya. Hambatan yang menjadikan sistem dari penganggaran anggaran belanja sendiri menjadi kurang efektif karena terkadang yang menjadi acuan penganggaran ada yang belum bisa dikelola pada proses perencanaan anggaran itu sendiri disebabkan adanya pandemic covid 19 yang melanda dunia termasuk daerah Kota Manado.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian **“Analisis Kinerja Anggaran Belanja Daerah Pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado”**

**2. TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1 Akuntansi**

Secara umum akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu proses identifikasi, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi ekonomi yang menghasilkan informasi ekonomi yang berguna bagi pembuatan kebijakan dan keputusan oleh pemakainya. Selain itu, akuntansi merupakan suatu kegiatan atau jasa yang berfungsi menyediakan informasi kuantitatif terutama bersifat keuangan. Akuntansi adalah suatu aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan (Sujarweni, 2015:1).

**2.2 Akuntansi Sektor Publik**

Akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai sebuah proses untuk mengumpulkan, mencatat, mengklasifikasikan, menganalisis serta membuat laporan transaksi keuangan untuk sebuah organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi pihak yang membutuhkannya untuk digunakan saat pengambilan sebuah keputusan. Organisasi sektor publik merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan publik dan penyelenggaraan negara dalam rangka pelaksanaan konstitusi negara. Organisasi sektor publik pada umumnya berupa lembaga-lembaga negara atau pemerintahan atau organisasi yang memiliki keterkaitan dengan keuangan negara.

Mahsun (2013:5) menyatakan sektor publik seringkali dipahami sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lain yang diatur dengan hukum.

**2.3 Pengelolaan Keuangan Daerah**

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sebagai mana dimaksud, merupakan sub system dari system pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

**2.4 Anggaran**

Anggaran merupakan sejumlah uang yang dihabiskan dalam periode tertentu untuk melaksanakan suatu program atau kegiatan. Anggaran berperan sebagai suatu perencanaan dalam perusahaan atau organisasi. Anggaran dalam arti luas meliputi jangka waktu anggaran direncanakan, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan. Anggaran dalam arti sempit meliputi rencana penerimaan dan pengeluaran dalam satu tahun saja. Anggaran sektor publik adalah rencana kegiatan dan keuangan periodik yang berisi program atau kegiatan dan jumlah dana yang diperoleh baik penerimaan/pendapatan dan dibutuhkan pengeluaran/belanja dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi. Sujarweni (2015b :28) menyatakan, anggaran sektor publik adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen organisasi untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan organisasi kepada pihak pemilik organisasi atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang publik.

**2.5 Proses Penyusunan Anggaran**

Penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran dilakukan dalam satu periode dan merupakan satu rangkaian proses yang saling berkaitan. Adapun proses penyusunan anggaran mempunyai 4 tujuan:

1. Untuk memberikan bantuan kepada sektor publik agar dapat mencapai tujuan dan

meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan.

2. Untuk membantu menciptakan efisiensi, efektifitas dan asas keadilan dalam menyediakan

barang dan jasa publik melalui proses prioritas.

3. Memungkinkan pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja.

4. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemegang manajemen organisasi

sektor publik.

**2.6 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekat nya merupakan salah satu instrument kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan yang dianggarkan APBD meliputi semua penerimaan uang melalui rekening umum kas daerah, yang menambah ekuitas dana merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.Pendapatan daerah dikelompokkan sebagai berikut:

a.Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b.Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

 Lain-lain Pendapatan terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat.

2. Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari:

a. Pelayanan Umum

b. Ketertiban dan Ketentraman

c. Ekonomi

d. Lingkungan Hidup

e. Perumahan dan Fasilitas Umum

f. Kesehatan

g. Pariwisata dan Budaya

h. Pendidikan

i. Perlindungan Sosial.

**2.7 Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan, dengan tujuan memberikan informasi tentang realisasi anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah.

**2.8 Analisis Belanja Daerah**

Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dengan cara yang memungkinkan pengukuran belanja tersebut. Analisis belanja daerah merupakan hal yang sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah melakukan anggaran belanja daerah secara ekonomis, efisien dan efektif. Sejauh mana pemerintah daerah telah melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran. Pemerintah daerah harus mengalokasikan belanja daerah secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Oleh karena itu, untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaan anggaran belanja perlu diperhatikan penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai.

**2.9 Analisis Kinerja Belanja**

Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian, karena organisasi dapat menetapkan *reward & punishment.* Tujuan sistem pengukuran kinerja yaitu untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik, menyeimbangkan ukuran kinerja finansial & non-finansial, mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan dibawah, serta memotivasi pencapaian *goal congruence*, alat mencapai kepuasaan individu maupun kolektif yang rasional. Manfaat pengukuran kinerja adalah memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen, memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja, sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman *( reward & punishment )* secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati, sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi, membantu mengidentifikasi apakah kepuasaan pelanggan sudah terpenuhi, membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah dan memastikan bahwa pengambilan dilakukan secara objektif (Palilingan, 2015).

**2.10 Kajian Penelitian Terdahulu**

Lantu (2017) dengan judul Analisis Efektivitas dan Efisiensi Realisasi Anggaran Belanja Dinas Kehutanan Sulawesi Utara, hasil penelitian menunjukan bahwa realisasi anggaran belanja Dinas Kehutanan Sulawesi Utara cukup efektif dan sangat efisien dari tahun 2013-2015.

 Liando (2016) dengan judul Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Pada Kabupaten Kepulauan Sangihe, hasil penelitian menunjukan bahwa kinerja belanj adalam LRA pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Pada Kabupaten Kepulauan Sangihe menggunakan alat analisis dinilai sudah baik.

 Rampengan (2016) dengan judul Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Manado, hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat efektifitas pelaksanaan anggaran belanja masih kurang efektif dan tingkat efisiensi secara keseluruhan sudah diolah dengan baik.

 Lontaan (2016) dengan judul Analisis Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2012-2014, hasil penelitian menunjukan bahwa penggunaan anggaran belanja daerah sudah efisien dan adanya pertumbuhan belanja dari tahun 2012-2014.

Warongan, Tinangon, dan Motoh (2020) dengan judul Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk Belanja pada Dinas Kesehatan Kota Manado, hasil penelitian Hasil Kajian Publik Kota Manado Dinas Kesehatan telah melaksanakan Standar Akuntansi Pemerintah untuk pengeluaran (biaya realisasi), dan peraturan berbasis akrual telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013.

**3. METODE PENELITIAN**

**3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan data apa adanya dan menjelaskan data atau kejadian dalam anggaran belanja daerah sebagai alat pengendalian dengan kalimat penjelasan secara kualitatif. Metode kualitatif untuk mendapatkan data yang mendalam pada anggaran belanja daerah dan suatu data yang mengandung makna secara signifikan yang dapat mempengaruhi sub stansi penelitian.

**3.2 Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado yang beralamat di Jln.Balai Kota No. 1, Kota Manado. Waktu penelitian dilaksanakan pada Bulan Oktober 2020 sampai Bulan Juni 2022.

**3.3 Jenis dan sumber data**

Data yang digunakan dalam peneiltian ini yaitu:

1. Data kuantitatif, yaitu Laporan Realisasi Anggaran Belanja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado tahun anggaran 2018-2020.

2. Data kualitatif, yaitu hasil wawancara dan gambaran umum dari Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah wawancara dan data Laporan Realisasi Anggaran Belanja yang diperoleh dari Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado.

**3.4 Metode Pengumpulan Data**

1. Wawancara

 2. Dokumentasi

**3.5 Metode dan Proses Analisis**

Metode analisis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menguraikan hasil analisis dari belanja yang didasarkan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yakni dengan konsep anggaran khususnya analisis belanja. Analisis deskriptif adalah suatu kegiatan untuk menyusun, mengklasifikasi, mengklasifikasi, menafsirkan serta menyimpulkan data sehingga memberikan suatu gambaran tentang masalah yang dihadapi atau yang diteliti.

 Proses analisis data yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado

2. Menghitung data dengan menggunakan analisis varians belanja, analisis pertumbuhan belanja, analisis keserasian belanja dan efesiensi belanja

3. Menginterpresesikan data yang telah dihitung dengan menggunakan analisis untuk menggambarkan suatu masalah yang terjadi pada instansi tersebut.

4. Menyimpulkan masalah yang terjadi dari hasil perhitungan analisis untuk mengetahui penyebab terjadinya masalah yang terjadi pada instansi tersebut.

**4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**4.1 Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Maria Runtuwene selaku kepala sub bagian keuangan, maka hasil penelitian adalah kinerja Laporan Realisasi Anggaran Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado sudah sesuai baik input, output, maupun outcome menyajikan informasi laporan realisasi anggaran belanja yang diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Laporan Realisasi Anggaran Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado tahun anggaran 2018-2020 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 4.1. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran BAPPELITBANGDA Kota**

 **ManadoTahun2018-2020**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uraian | **2018** | **2019** | **2020** |
| Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi | Anggaran | Realisasi |
| Belanja | 19,303,021,850 | 17,543,269,695 | 17,869,262,600 | 16,857,480,688 | 17,343,148,400 | 11,651,919,083 |
| BelanjaTidak Langsung | 4,956,177,200 | 4,839,142,712 | 5,569,736,600 | 5,427,917,438 | 5,675,161,400 | 5,273,167,988 |
| Belanja Langsung | 14,346,844,650 | 12,704,126,983 | 12,299,526,000 | 11,429,563,250 | 11,667,987,000 | 6,378,751,095 |

Tabel 4.1.diatas menunjukkan bahwa anggaran mengalami fluktuasi setiap tahunnya.

Jumlah anggaran yang berakhir pada tahun 2018 sebesar Rp.19,303,021,850,- dengan jumlah belanja yang teralisasikan sebesar Rp. 17,543,269,695,- merupakan belanja yang berasal dari belanja langsung dan belanja tidak langsung.Jumlah anggaran yang berakhir pada tahun 2019 sebesar Rp.17,869,262,600,- dengan jumlah belanja yang teralisasikan sebesar Rp.16,857,480,688,-. Jumlah anggaran yang berakhir pada tahun 2020 sebesar Rp. 17,343,148,400,- dengan jumlah belanja yang teralisasikan sebesar Rp.11,651,919,083,-

**Analisis Varians Belanja**

Analisis varians belanja merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran yang ada pada tahun anggaran yang tersedia di tahun anggaran tersebut. Rumus yang digunakan:

**Tabel4.2. Analisis Varians Belanja**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tahun | AnggaranBelanja | RealisasiBelanja | VariansBelanja | Perbandingan(%) |
| 2018 | 19,303,021,850 | 17,543,269,695 | 1,759,752,155 | 90,88 |
| 2019 | 17,869,262,600 | 16,857,480,688 | 1,011,781,912 | 94,34 |
| 2020 | 17,343,148,400 | 11,651,919,083 | 5,691,229,317 | 67,18 |

Data Hasil Olahan

Pada tahun 2018 penyerapan anggaran pada tabel Varians Belanja diatas sebesar Rp 1,759,752,155 atau sekitar 90,88 % yang menunjukkan bahwa tidak semua aktivitas dan kegiatan yang dilakukan oleh instansi terserap sepenuhnya pada pembiayaan yang berjalan selama satu periode tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam hal ini menyisakan perbandingan persentase sekitar 9,12 % dari penyerapan anggaran yang ada dalam realisasi anggaran belanja. Pada tahun 2019 penyerapan anggaran berdasarkan Varians Belanja sebesar Rp1,011,781,912 atau sekitar 94,34 %, menyisakan perbandingan persentase sekitar 5,66 % dari penyerapan anggaran yang ada dalam realisasi anggaran. Jika dilihat dari tahun sebelumnya terjadi kenaikan efisiensi penggunaan anggaran sekitar 3,46 % dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 penyerapan anggaran berdasarkan Varians Belanja adalah Rp 5,691,229,317,- atau sekitar 67,18%, menyisakan perbandingan persentase sekitar 32.82 % dari penyerapan anggaran yang ada dalam realisasi anggaran belanja. Terlihat penurunan penggunaan anggaran dari tahun sebelumnya sebesar 63,72 % jika memperhatikan pada tahun sebelumnya.

**Analisis Pertumbuhan Belanja**

Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui belanja dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan positif atau negatif.

**Tabel 4.3. Rekapitulasi Anggaran Belanja Daerah Bappelitbangda Kota Manado Periode**

 **Tahun 2018-2020**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tahun | Anggaran | Realisasi | BelanjaTidak Langsung | BelanjaLangsung |
| 2018 | 19,303,021,850 | 17,543,269,695 | 4,839,142,712 | 12,704,126,983 |
| 2019 | 17,869,262,600 | 16,857,480,688 | 5,427,917,438 | 11,429,563,250 |
| 2020 | 17,343,148,400 | 11,651,919,083 | 5,273,167,988 | 6,378,751,095 |

**Sumber : Data Anggaran Bappelitbangda Kota Manado**

Perhitungan dengan menggunakan rumus pertumbuhan belanja berdasarkan tabel 4.3. sebagai berikut:

**Tabel 4.4.** **Analisis Pertumbuhan Belanja** **Tahun 2018 - 2020**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Uraian | 2018 - 2019 | 2019 – 2020 |
| RealisasiBelanjaTahunt-1 | 17,543,269,695 | 16,857,480,688 |
| RealisasiBelanjaTahunt | 16,857,480,688 | 11,651,919,083 |
| Kenaikan/(Penurunan) | (685,789,007) | (5,205,561,605) |
| % | 3,91 | 30,87 |

Sumber : Data Olahan 2021

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Pertumbuhan Anggaran Belanja dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 adalah negatif sebesar Rp.685,789,007,- atau sebesar 3,91 % . Pertumbuhan Anggaran Belanja dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 adalah negatif sebesar Rp. 5,205,561,605,-dan ditinjau dari segi persentase mengalami penurunan yaitu menjadi 30,87 %. Secara umum Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado belum melakukan pemanfaat Belanja dalam APBD secara efisien.

**Analisis Keserasian Belanja**

Perhitungan dengan menggunakan rumus Keserasian Belanja berdasarkan tabel4.3. sebagai berikut :

**Tabel 4.5. Analisis Keserasian Belanja Tahun 2018 – 2020**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tahun | Total Belanja | BelanjaTidak Langsung | BelanjaLangsung | %Belanja Tidak Langsung | %Belanja Langsung |
| 2018 | 17,543,269,695 | 4,839,142,712 | 12,704,126,983 | 27,58 | 72,41 |
| 2019 | 16,857,480,688 | 5,427,917,438 | 11,429,563,250 | 32,20 | 67,80 |
| 2020 | 11,651,919,083 | 5,273,167,988 | 6,378,751,095 | 45,25 | 54,74 |

Sumber : Data Olahan 2021

Berdasarkan tabel 4.5.dapat dijelaskan bahwa dari tahun 2018 sampai tahun 2020 penggunaan anggaran terfokus pada belanja langsung. Belanja langsung terdiri dari belanja barang dan jasa. Sedangkan belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang diatur dan dilaksanakan berdasarkan aturan dan pedoman ketetapan dari pemerintah yang berlaku.

Di tahun 2018 penggunaan pada alokasi pembiayaan belanja langsung sekitar 72,41% atau sekitar Rp 12,704,126,983,- . Di tahun 2019 penggunaan pada alokasi pembiayaan belanja langsung mengalami penurunan menjadi 67,80 % atau Rp 11,429,563,250,-, sedangkan tahun 2020 penggunaan pada alokasi pembiayaan belanja langsung mengalami penurunan menjadi 54,74 % atau sekitar Rp. 6,378,751,095,-.. Berdasarkan analisis menunjukkan persentase belanja langsung lebih tinggi dari persentase belanja tidak langsung. Hal tersebut adalah baik, karena Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado lebih mementingkan untuk pembangunan daerah.

**Analisis Efisiensi Belanja**

Rasio efisiensi belanja digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Kriteria efisiensi belanja sebagai berikut:

* 1. Sangat efisien : <60%
	2. Efisien :60%-80%
	3. Cukup efisien :81%-90%
	4. Kurang efisien :91%-100%
	5. Tidak efisien :>100%

Perhitungan dengan menggunakan rumus analisis rasio efisiensi dengan berdasarkan pada tabel 4.3. sebagai berikut :

**Tabel 4.6. Rasio Efisiensi Belanja Daerah Bappelitbangda Kota Manado Periode Tahun**

 **2018-2020**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tahun | Anggaran | Realisasi | Rasio Efisiensi (%) | Kriteria |
| 2018 | 19,303,021,850 | 17,543,269,695 | 90,88 | Cukup Efisien |
| 2019 | 17,869,262,600 | 16,857,480,688 | 94,34 | Kurang Efisien |
| 2020 | 17,343,148,400 | 11,651,919,083 | 67,18 | Efisien |

**Sumber :** Data Olahan 2021

Berdasarkan tabel 4.6 diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2018 tingkat efisiensi penggunaan anggaran berada pada persentase 90,88 % dengan penggunaan anggaran sekitar Rp 17,543,269,695,- dari total anggaran yang ada. Dapat dikatakan jika penggunaan anggaran pada tahun 2018 cukup efisien dalam melakukan penghematan anggaran belanja. Pada tahun 2019 tingkat efisiensi menurun jika dilihat dari angka persentase di tahun sebelumnya. Penggunaan anggaran berada pada persentase 94,34% dengan penggunaan sekitar Rp 16,857,480,688, dari total angggaran yang ada. Dapat dikatakan jika penggunaan anggaran pada tahun 2019 kurang efisien dalam melakukan penghematan anggaran belanja. Pada tahun 2020 tingkat efisiensi meningkat jika melihat angka persentase dari tahun sebelumnya. Ditahun ini penggunaan anggaran berada pada persentase 67,18% dengan penggunaan sekitar Rp 11,651,919,083, dari total anggaran yang ada. Dapat dikatakan jika penggunaan anggaran pada tahun 2020 efisien dalam melakukan penghematan anggaran belanja.

Dapat dikatakan bahwa pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 kemampuan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado dalam melakukan penghematan anggaran belanja cukup efisien, terbukti dengan rata-rata rasio efisiensi mencapai sebesar 84,13 %. Efisiensi ditentukan oleh ketepatan menggunakan anggaran pada program-program prioritas yang kesemuanya dimasukkan kedalam anggaran belanja.

**4.2 Pembahasan**

**Kinerja anggaran belanja dilihat dari analisis varians belanja**

Analisis varians belanja yang berfungsi untuk mengetahui efisiensi penggunaan anggaran belanja yang digunakan selama tahun anggaran, dengan tidak melebihi anggaran pada periode tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa adanya penghematan penggunaan realisasi anggaran karena tidak melebihi batas maksimum anggaran bahwa dalam penyerapan penggunaan anggaran dapat dikatakan efisien, walaupun dilihat dari segi keuangan yang mengalami penurunan penggunakan dalam memenuhi keperluan pembiayaan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado tidak memuaskan, namun demikian pada dasarnya kinerja anggaran yang ada dapat dikatakan baik, karena adanya penghematan anggaran.

**Kinerja anggaran belanja dilihat dari analisis pertumbuhan belanja**

Berdasarkan analisis pertumbuhan belanja untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan belanja, maka dapat diketahui bahwa Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado tahun 2018-2020 mengalami penurunan pertumbuhan artinya bahwa daerah pada tahun tersebut belum mampu meningkatkan pertumbuhan daerahnya. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian menurut Rani Febri Ramadani pada tahun 2016 dan Dewi Sartika 2018 bahwa pertumbuhan yang positif menunjukkan bahwa daerah telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan daerah derahnya sedangkan hasil penelitian ini mengalami pertumbuhan yang negatif.

**Kinerja anggaran belanja dilihat dari analisis keserasian belanja**

Berdasarkan analisis keserasian belanja yang bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antara belanja, dalam memprioritaskan alokasi dananya dapat dilakukan dengan cara menghitung rasio belanja langsung dan belanja tidak langsung. Secara umum dapat lihat bahwa dana belanja daerah lebih dioptimalkan untuk belanja langsung menyebabkan alokasi dana untuk belanja tidak langsung pada tahun 2018 sampai tahun 2020 menunjukkan nilai yang rendah, sehingga anggaran Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado dalam rencana maupun realisasi belanja daerahnya lebih besar porsinya pada belanja langsung hal ini terjadi karena penggunaan anggaran pada perencanaan program prioritas lebih mengoptimalkan ke dalam anggaran belanja langsung untuk pembangunan daerah.

**Kinerja anggaran belanja dilihat dari analisis efisiensi belanja**

Kinerja anggaran belanja dilihat dari analisis efisiensi belanja pada tahun 2018 cukup efisien dalam melakukan penghematan anggaran belanja, pada tahun 2019 kurang efisien dalam melakukan penghematan anggaran belanja, pada tahun 2020 efisien dalam melakukan penghematan anggaran belanja. Pada tahun 2018-2020 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado dalam melakukan penghematan anggaran belanja cukup efisien, terbukti dengan rata-rata rasio efisiensi mencapai sebesar 84,13 %. Efisiensi ditentukan oleh ketepatan menggunakan anggaran pada program-program prioritas yang kesemuanya dimasukkan kedalam anggaran belanja.

**5. KESIMPULAN DAN SARAN**

**5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tingkat efisiensi anggaran belanja pada tahun 2018-2020, dengan menggunakan Analisis Varians Belanja menunjukkan adanya efisiensi penggunaan anggaran selama tahun anggaran, karena tidak melebihi target anggaran pada priode tersebut. Namun dilihat dari pengukuran Rasio Efesiensi Belanja memperlihatkan bahwa penggunaan anggaran yang kurang efisien, karena belum berhasil memenuhi syarat efisiensi yaitu penggunaan dana yang minimum untuk mencapai hasil yang maksimal.

2. Pertumbuhan realisasi anggaran belanja pada instansi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado berdasarkan Analisis Pertumbuhan Belanja dari tahun 2018 sampai tahun 2020 terus mengalami perubahan. Dari Analisis Pertumbuhan Belanja tahun anggaran 2018/2019 dan tahun anggaran 2019/2020 menunjukkan adanya pertumbuhan belanja negatif. Pertumbuhan realisasi anggaran belanja pada tahun 2018/2019 adalah sebesar 3,91% dan tahun 2019/2020 sebesar 30,87%.

3. Berdasarkan perhitungan Analisis Keserasian Belanja pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado lebih memprioritaskan anggaran pada belanja langsung daripada belanja tidak langsung, hal ini menunjukkan bahwa Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado lebih mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan daerahnya, Hal ini baik, karena pemerintah lebih mementingkan untuk pembangunan didaerahnya.

**5.2 Saran**

1. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih rinci lagi dalam menganalisa kinerja anggaran belanja pemerintah daerah dengan menggunakan berbagai macam rasio dan dapat menggambarkan kinerja anggaran belanja daerah yang sebenarnya. Selain itu, diharapkan penelitian selanjutnya untuk menambah lagi jangka waktu penelitian, sehingga hasil penelitiannya lebih andal dan akurat daripada hasil penelitian oleh penulis.

2. Bagi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado

a. Pertumbuhan belanja mengalami pertumbuhan yang negative berdasarkan periode

 tersebut sehingga diharapkan dari hasil perhitungan dapat dijadikan acuan untuk

 penyusunan anggaran belanja agar lebih baik lagi di tahun berikutnya

b. Penyerapan kinerja anggaran belanja sudah memenuhi syarat efisiensi yaitu

 penggunaan dana yang minimum untuk mencapai hasil yang maksimum, terutama

 bagi perencanaan dan pembangunan daerah.

c. Semakin meningkatkan kinerja dalam pengelola anggaran belanja daerah secara

 khusus dan APBD secara umum. Dengan kinerja yang baik maka efektivitas,

 produktivitas dan efisiensi belanja juga akan semakin baik. Terutama meningkatkan

 pertumbuhan optimal anggaran belanja yang wajar dari tahun sekarang sampai

 seterusnya sehingga kinerja anggaran yang diinginkan terlaksana sesuai visi dan misi

 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abogun, S. dan Fagbemi, T. 2012*. The Efficacy of Budgeting as a Control Measure in Developing Economies: A Study Judul from Nigeria*. International Journal of Asian Social Science. Vol 8, No. 1, pp. 176-182.

Adongo, Kenneth. 2013. *Budgetarary Control as a Measure of Performance of State Corporations in Kenya.* International Journal of Accounting and Taxation. Vol 1, No.1, pp. 38-57.

Anthony, N. Robert & Govindarajan. 2011. Sistem Pengendalian Manajemen. Tanggerang: Karisma Publishing Group.

Giri, E. F. 2017. *Akuntansi Keuangan Menengah 1*. Edisi kedua, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Gerung, Ireyne. *Analisis tingkat efisiensi belanja langsung pada secretariat daerah Kota Tomohon.* Jurnal Riset Akuntansi Going Concern. Vol 15, No. 3, Hal 417-425

Grandis, F. dan Mattei, G. 2014.*The Authorizing Function of Budgeting in Public Administration. Applicability of IPA AS 24 In Italy. Open Journal of Accounting,* 3, pp. 45-48.

Kainde, Christian. 2013. *Analisis Varians Dan Pertumbuhan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Bitung*. Jurnal EMBA.Vol 1, No. 3, Hal 393-400.

Karinda, Chrisman. 2013. *Analisis kinerja anggaran belanja pada badan pengelola keuangan dan barang milik daerah Provinsi Sulawesi Utara.* Jurnal accountability. Vol 2, No. 2, Hal 73-84.